

Pengaruh Geohistoris Pada Kerajaan Sriwijaya

I Nyoman Bayu Pramatha
Prodi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali
pramarthabayu@gmail.com

Sriwijaya bukanlah kata asing bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kita pernah memilikinya sebagai sebuah negeri maritim terbesar dijamannya. Dengan armada laut yang kuat Sriwijaya menaklukkan berbagai wilayah strategis seperti Melayu sampai sebagian besar pulau Jawa

Kata Kunci: *Geohistoris, Sriwijaya*

Pendahuluan

Geografi tanpa sejarah bagaikan jerangkong tanpa gerak, sejarah tanpa geografi bagai kelana tanpa tempat tinggal (East dalam Daldjoeni: 7). Seperti itulah ungkapan East untuk menggambarkan betapa lingkungan geografis mempunyai peran penting dalam perjalanan sejarah, bukan sekedar “panggung”, *setting* yang sering kali diabaikan perannya oleh kebanyakan ahli sejarah dan sejarawan (sebelum tahun 1960an). Namun pada masa setelahnya banyak peneliti yang membuktikan bahwa kondisi lingkungan sangat mempengaruhi berkembang dan/atau runtuhnya suatu peradaban. Sebagai contohnya peradaban Hindu-Budha khususnya kerajaan Sriwijaya yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Sebenarnya kata Sriwijaya bukanlah kata asing bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kita pernah memilikinya sebagai sebuah negeri maritim terbesar dijamannya. Dengan

armada laut yang kuat Sriwijaya menaklukkan berbagai wilayah strategis seperti Melayu sampai sebagian besar pulau Jawa. Ke-strategis-an emporium inilah yang menjadikannya negeri yang masyhur di dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga tidaklah mengherankan jika banyak temuan benda purbakala di China, India, Malaysia dan sekitarnya yang diidentifikasi berasal dari kerajaan ini.

Disisi lain, setiap peradaban adalah siklus kata Toynbee. Peradaban tidak sekonyong-konyong ada, tapi terbentuk kemudian berkembang lalu mengalami kemunduran yang bersifat determinan. Oleh karenanya generasi berikutnya terinspirasi untuk mencapai keagungan peradaban masa lalu. Pun juga dengan Sriwijaya. Negeri ini tumbuh, berkembang dan runtuh dengan berbagai sebab. Salah satu sebab yang akan menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini adalah sebab geografis. Yaitu situasi alam atau lingkungan mempengaruhi

tumbuh, berkembang dan runtuhnya kerajaan Sriwijaya.

Pembahasan

A. Kondisi Geografis Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi salah satu kerajaan yang berjaya di Nusantara menjadi misteri tersendiri bagi kalangan ahli sejarah. Pasalnya, tidak ada tinggalan bangunan istana kerajaan seperti kerajaan Majapahit. Kalaupun ada hanyalah sedikit, dan juga terkesan tercecer diberbagai tempat. Pun juga bukti prasasti dan kronik Cina maupun Arab tidak menyimpulkan hal yang sama. Hal ini melahirkan banyak hipotesis.

Di bawah ini ada beberapa hipotesis para ahli yang mencoba melokalisasikan kerajaan Sriwijaya seperti yang tertera dalam tabel berikut.

A.1 Tabel daftar tokoh, tahun, lokasi dan tokoh pendukung hipotesis

N o	Nama	Tahun	Lokasi	Keterangan
				/

				Pendukung
1	G. Coedes	1918	Palemba ng	
2	FDK Bosch	1930	Jawa	
3	R.C. Majumda r	1933	Ligor (Thailan d)	
4	H.G Quaritch Wales	1935	Chaiya (Thailan d)	Chand Chiraya Rajani (1974)
5	G. Coedes	1936	Palemba ng	Nilakanta (1949) Poerbatjara ka (1952) Slamet Muljana (1963) Wolters (1967) Bronson (1974)
6	JL Moens	1937	Kedah (Malaysi a) à Muar a Takus (Pekanb aru- Riau)	
7	R. Soekmon o	1958 & 1979	Jambi	Geomorfol ogi
8	Boechari	1979	Batang Kuantan (Palemb ang) à M ukha Upang (Palemb ang)	

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa ada salah satu hipotesis yang banyak dianut kebanyakan ahli

sejarah, yakni hipotesisnya Coedes dkk yang menyatakan bahwa Palembang (Sumatera) merupakan daerah yang tepat bagi pusat kerajaan Sriwijaya berdasarkan prasasti dan berita I-Tsing. Mulyana (2010 dalam blog) menegaskan bahwa pelokasian Sriwijaya di Palembang memiliki bukti-bukti tak terbantah. Uraian I-Tsing bahwa Sriwijaya di tenggara Malayu dan di muara sungai besar. Penelitian geomorfologi bahwa Palembang abad ke-7 berlokasi di pantai. Sebagian besar prasasti Sriwijaya ditemukan di Palembang. Dan yang terpenting, prasasti Telaga Batu di Palembang merinci nama jabatan yang hanya mungkin ada di pusat pemerintahan: putra mahkota, selir raja, senapati, hakim, para menteri, sampai pembersih dan pelayan istana. Namun dengan adanya hipotesis lain yang didukung bukti-bukti, maka kemungkinan ibukota Sriwijaya berpindah-pindah. Lalu bagaimanakah kondisi geografis kerajaan Sriwijaya yang terletak di pulau Sumatera tersebut? Untuk lebih

jelasnya mari kita cermati peta Asia Tenggara purba di bawah ini.

Peta di atas menggambarkan wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan pada abad ke-8an. Disana ada China, Chenla, Champa, Sriwijaya, dan tanah bebas. Pada awalnya jangkauan kekuasaan Sriwijaya hanya meliputi Minangkabau dan tanah Batak. Kemudian terjadi perluasan ke luar Sumatera dengan menundukkan Kamboja dan Siam. Bagian besar dari Jawa dan pantai-pantai Kalimantan seperti Banjarmasin juga dikuasai bahkan sampai bagian tertentu dari Filipina.

Mengenai kegiatan masyarakat Sriwijaya Robbequain (dalam Daldjoeni, 1982 : 36-37) menggambarannya sebagai berikut. Latar belakang alam dari kebesaran Sriwijaya ternyata tidak banyak ditemukan pada sumbernya yang berupa hutan-hutan dan tanahnya, akan tetapi lebih pada kegiatan orang-orangnya di lautan. Negara tersebut maju dalam perniagaan laut; juga banyak diperoleh keuntungan dari hasil perompakan atas kapal-kapal

pengangkut hasil antar samudra. Dari pantai-pantai Sumatra diawasinya Selat Malaka serta Selat Sunda, dua jalan laut penghubung Samudra Hindia dengan lautan Cina Selatan dan Lautan Nusantara.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kebesaran Sriwijaya terletak pada kegiatan ekonominya dalam bentuk pelayaran-perdagangan. Serdadunya tidak hanya tentara biasa namun juga armada bajak laut. Akhirnya hegemoni ekonomi laut dapat dipertahankan.

Peristiwa goegrafi penting berikutnya adalah terbentuknya dataran rendah yang terjadi pada seluruh pantai Timur Sumatera mulai dari Sukadana di Lampung sampai Sungai Asahan di utara. Ini berarti Palembang juga termasuk daerah yang mengalami peristiwa tersebut.

Di zaman tersier kuno, pegunungan Bukit Barisan mengalami proses pelapukan yang hasilnya berupa batuan sabak kuno, batuan granit dan diorite termasuk juga batuan efusif, serta batuan metamorfosa. Karena hasil pelapukan tersebut sangat basa

maka bersamaan dengan proses tersebut terbentuklah pasir kuarsa. Selain itu juga terbentuk lempung dengan kadar S₀₂ yang tinggi yang kemudian diendapkan di laut dan sebagian di darat berupa tanah lempung.

Adapun bagian-bagian di atas permukaan laut juga mengalami erosi hebat dan sungai-sungai membuang bahan-bahan berkilis ke dalam lautan. Kemudian dijaman berikutnya yakni pliosen mulailah terjadi proses pengangkatan berbagai bagian pulau Sumatera dengan diselingi masa-masa istirahat pendek. Dalam jaman yang penuh dengan kegiatan vulkanisme maka terbentuklah pegunungan Bukit Barisan, khususnya bagian tengah dari deretannya. Dengan kejadian itu semuanya maka diberbagai tempat batu-batuan tua menjadi tertutup oleh yang muda. Tetapi bersamaan dengan itu banyak sungai yang mengerosikan bahan eflata dari gunung-gunung api. Karena batuannya kebanyakan bersifat asam seperti rhiolit, andesit asam, dasit dan liparit, maka hancurannya yang diendapkan selain terdiri dari atas

glimmer dan hornblende juga khususnya batu apung, veldspat, alkali dan kwarsa.

Endapan-endapan tersebut pada awalnya hanya terjadi pada lautan yang mendangkal, tetapi kemudian juga menjalar sampai keseluruhan lautan yang terletak diantara Sumatera, Malaka dan Kalimantan, dengan demikian lautan Sunda (seperti halnya Jawa) pernah menjadi daratan. Dengan selesainya masa tersebut, kini berlanjut ke masa kwarter yang pada masa ini terbentuk dataran rendah Palembang yang sekarang sering disebut sebagai suatu “talang”. Semakin dataran tersebut terangkat, semakin dalam sungai-sungai mengiris permukaan buminya sehingga dengan cara demikian kemungkinan untuk banjir berkurang. Proses yang terjadi dari jaman ke jaman adalah proses pencucian tanah (soil leaching) oleh curah hujan. Ini berlangsung hingga masa kini dan kesuburan yang terkandung tanah makin habis. Bersamaan dengan itu vegetasi pun menjadi berkurang terus-menerus. Namun di kiri kanan sungai Musi

misalnya terdapat jalur pinggiran yang disebut “renah” di situ terjadi peremajaan tanah karena air banjir meluapkan pula bahan-bahan kesuburan yang berasal dari gunung-gunung api di pedalaman Sumatera.

Perlu pula ditambahkan bahwa berdasarkan berbagai penyelidikan dimasa terjadi pasang setinggi kurang lebih 40 meteran pada jaman kwarter, dataran-dataran rendah yang menghubungkan daerah pegunungan di Sumatera, Malaka, Bangka Belitung, Kalimantan dan Jawa menjadi tenggelam lagi, sehingga terbentuklah lautan-lautan baru seperti Laut China Selatan, Selat Sunda, Selat Malaka dan Laut Jawa. Sejak jaman itulah di sekitar Palembang dan Jambi karena air sungai-sungainya yang besar menjadi terhambat untuk bermuara, dan terbentuklah rawa-rawa berair tawar. Latar belakang pedologis seperti di atas perlu diketahui untuk memahami pengaruh alam yang tidak langsung terhadap proses muncul dan tenggelamnya kerajaan Sriwijaya.

Penelaahan tentang Sriwijaya (Sumatera) tidak berhenti sampai

disini. Masih ada lagi usaha lain yakni meneliti pertumbuhan garis pantai Sumatera secara Geomorfologis oleh para ahli termasuk Soekmono. Sebenarnya sebelum Soekmono, penelitian ini sudah dilakukan oleh Obdeyn. Obdeyn berkesimpulan bahwa pada masa Sriwijaya dulu, dataran alluvial Sumatera pantai timur seperti yang ada sekarang ini belum ada. Jazirah Malaka waktu itu membujur lebih ke selatan sampai ke Pulau Bangka dan Belitung sedangkan Kepulauan Riau dan Lingga merupakan sambungannya. Adapun Selat Sunda belum atau tidak dikenal orang. Satu-satunya jalan laut yang menghubungkan Samoedera Hindia dengan laut China Selatan adalah Selat Malaka dengan belokannya setelah melewati pulau Bangka.

Pada tahun 1954 melakukan penelitian lanjutan yang bekerja sama dengan Angkatan Udara RI dan memberikan kesimpulan bahwa situs arkeologis disekitar Palembang semuanya (seperti bukit Siguntang, Kedukan Bukit, Gadingsuro, Candi Angsoka, Candi Welang dan

telagabaru) ada di endapan neogen dan tersier lainnya: artinya tidak ada yang terdapat di tanah aluvial. Pada peta (gambar P.3) nampak bahwa kota Jambi yang sekarang, dimasa dulunya terletak disuatu teluk pada muara sungai Batanghari. Teluk tersebut jorokannya masuk jauh hampir sampai pulau Tambesi. Adapun di depan teluk tersebut terdapat tiga buah pulau. Setelah pantai Jambi tersebut direkonstruksi, menjadi nyatalah bahwa lokasi penemuan arkeologis (seperti Soloksipin di dekat Jambi, Candi Tinggi, Gumpung dan Astano dekat muara Jambi), semuanya itu ada di formasi tanah dari batuan neogen yang pernah mengalami pengangkatan.

Jika dibandingkan lokasi Jambi dengan Palembang nampaknya bahwa Jambi menempati suatu teluk sedang Palembang menempati ujung jazirah yang pangkalnya ada disekitar Sekayu sekarang. Baik Jambi maupun Palembang sekarang jaraknya dari lautan rata-rata ada sekitar 75 km, karena endapan sungai Musi dan Batanghari telah membentuk dataran pantai yang baru. Menurut geology

Van Blemmen, garis pantai di muara Batanghari majunya setahun rata-rata 75 m sedangkan Sungai Musi 125 m. Perbedaan tersebut karena sungai Musi lebih besar sebagai akibat dari masuknya air Ogan dan Komering. Kesimpulannya adalah bahwa pada awalnya, kerajaan Sriwijaya terletak di pantai, dalam arti bahwa lokasi Jambi di tepi teluk dan Palembang di ujung jazirah.

Sriwijaya muncul dalam sejarah pada bagian kedua abad ke-7 dan runtuh pada akhir abad ke-14. Selama tujuh abad itu pantainya maju ke timur terus-menerus. Bahwa menurut berita Arab dan Cina lokasi Sriwijaya itu di tepi sungai besar, hal itu tentunya berlaku untuk abad ke-10 atau ke-11. Mengenai pendapat Obdeyn bahwa jazirah Malaka memanjang kearah selatan sampai Bangka dan Belitung dan kondisi ini bertahan terus sampai tahun 1400, van Bemmelen dalam buku geologinya menunjukkan bahwa Bangka Belitung beserta kepulauan Singkep mewujudkan suatu deretan pegunungan yang secara berangsur

mengalami penenggelaman (Daldjoeni, 1982: 42-44.)

B. Pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan kerajaan Sriwijaya

1. Sungai Musi

Pada pembahasan ini terdiri dari dua poin inti pembahasan yakni yang pertama mengenai peran sungai Musi terhadap perkembangan kemajuan kerajaan Sriwijaya dan upaya penjangkauan wilayah strategis-ekonomis dengan cara penaklukan. Penggambaran sungai Musi melalui peta yang relevan tidak ditemukan sehingga pembahasannya menggunakan peta baru yang masih ada sangkut pautnya dengan kegiatan masyarakat dalam membangun pos-pos dagang sepanjang sungai Musi. Kerajaan ini terdiri atas tiga zona utama; daerah ibukota muara yang berpusatkan Palembang, lembah Sungai Musi yang berfungsi sebagai daerah pendukung dan daerah-daerah muara saingan yang mampu menjadi pusat kekuasaan saingan. Wilayah hulu sungai Musi kaya akan berbagai

komoditas yang berharga untuk pedagang Tiongkok.

Dibagian hulu sungai Musi, Sriwijaya memiliki akses memasuki daerah pedalaman yang menyediakan suplai komoditas lokal yang berlimpah semacam kayu, resin aromatic dan rempah-rempah. Satu-satunya perkecualian dari daftar komoditas itu adalah emas karena, bertentangan dengan Malayu di Batang hari, sungai Musi tidak punya hubungan dengan pusat produksi emas di dataran tinggi Minangkabau. Palembang memiliki akses yang mudah ke laut disebabkan oleh letak geografis situsnya. Wilayah itu sangat rendah dan rata yang memungkinkan kapal-kapal laut bisa menyusuri sungai sampai ibukota tanpa memerlukan bongkar-muat kapal (Munoz, 2009: 159).

Karena daerah pedalamannya penghasil komoditas penting membuat Sriwijaya menjadi pengendali (pemenang dalam) perdagangan yang masuk dari Jawa maupun yang akan berangkat ke India. Namun, posisi seperti ini masih belum memuaskan Sriwijaya. Akhirnya muncullah ide

untuk mengendalikan semua pelabuhan yang berlokasi dikedua sisi selat Malaka dan Sunda. Kendali atas semua pelabuhan ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan sebuah hegemoni maritim atas emporium kompetitor lainnya. Siapapun yang memegang kendali ini bisa mengumpulkan pajak dan upeti dari semua barang yang transit dan menjadi pemain utama dalam perdagangan upeti dengan China.

Pada masa selanjutnya, untuk tetap mempertahankan stabilitas didalam mandala mereka, para raja Sriwijaya berkewajiban untuk bisa berperan sebagai seorang politisi yang cakap. Jarak antara mandala-mandala jauh ini memaksa Raja untuk lebih bersandar pada kesetiaan dibanding dengan paksaan. Kesetiaan ini bersifat temporal sehingga mereka harus ditaklukkan secara militer. Sehingga Krom (dalam Hall: 54-55) mengatakan bahwa untuk mempertahankan posisi hak istimewa, Sriwijaya melibatkan pendidikan angkatan perang secara terus-menerus seperti yang dilakukan Belanda abad ke-17.

2. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi Sriwijaya ini unik, berbeda dengan kerajaan lain seperti Mataram-agraris. Kalau struktur birokrasi Mataram sudah jelas mengutamakan tata pemerintahan dalam negeri. Sumadyo (2010) menjelaskan bahwa sejumlah prasasti menunjukkan birokrasi yang memperhatikan sekali pelaksanaan berbagai aturan untuk menjamin ketenangan dalam negeri. Hal seperti ini belum ditemukan di daerah Sriwijaya. Adapun prasasti yang telah ditemukan umumnya berasal dari abad ke-7 atau ke-8, yaitu masa awal tumbuhnya Sriwijaya sebagai suatu kekuatan. Dari prasasti tersebut menimbulkan kesan bahwa masa itu adalah masa penaklukan. Tentara Sriwijaya bergerak diseluruh negeri dalam suatu usaha pasifikasi.

Hal yang menarik lagi bahwa sebagian dari prasasti itu mengandung ancaman kutukan yang ditujukan pada keluarga raja sendiri. Hal ini terjadi karena keluarga raja tersebut berada diluar pengawasan langsung atau *mbalelo*. Mereka adalah anak-

anak raja yang diberi kuasa didaerah-daerah. Berdasarkan prasasti kota kapur (Sumadyo, 1993: 71), telaga batu dan tugu-tugu peringatan yang ditemukan di Jambi, Kota Baru dan Lampung menyiratkan bahwa Jaya Nasa bukanlah raja yang lunak dan tidak ragu-ragu menggunakan tindakan-tindakan keras untuk menakuti para penantanginya. Salah satu contohnya adalah menggunakan mantra dan kutukan magis ajaran tantra yang tertera dalam prasasti Telaga batu yang bertuliskan: “Jika kalian tidak setia padaku, kalian akan terbunuh dengan kutukan ini” (Munoz, 2009:172).

Keadaan tersebut jika benar, menunjukkan sikap keras dari raja yang berkuasa. Suatu sikap yang tidak menghendaki kebebasan bertindak yang terlalu besar kepada penguasa daerah. Sikap demikian ini sebenarnya tidak mnegherankan untuk suatu negara yang hidup dari perdagangan. Pasalnya bahwa penguasa harus menguasai jalur-jalur perdagangan dan pelabuhan-pelabuhan tempat penimbunan komoditas dagang.

Dengan penguasaan dua aspek tersebut, dengan sendirinya memerlukan pengawasan langsung dari penguasa. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau raja Sriwijaya tidak membenarkan sikap tidak setia, meskipun hanya sedikit, termasuk dari anaknya sendiri.

Sebagai sebuah negara maritim-bisnis, Sriwijaya telah mengembangkan suatu tradisi diplomasi yang menyebabkan kerajaan tersebut lebih metropolitan sifatnya. Untuk mempertahankan peranannya sebagai negara bisnis, Sriwijaya lebih memerlukan kekuatan militer yang dapat melakukan gerakan ekspedisioner daripada negara agraris. Kelangsungan negara Sriwijaya lebih tergantung pada pola-pola perdagangan. Hal ini terbukti ketika China mulai ikut berdagang dikawasan selatan peranan Sriwijaya berkurang sebagai pangkalan utama perdagangan antara Asia Tenggara dengan China.

3. Hubungan dengan luar negeri

Sumatera merupakan pulau besar di Indonesia bagian barat yang terdekat letaknya dengan daratan

AsiaTenggara. Diantara Sumatera dan Semenanjung Melayu, suatu jazirah yang merupakan bagian dari daratan Asia Tenggara, hanya terdapat sebuah selat yang tidak begitu lebar yaitu selat Malaka. Kedudukan geografis ini merupakan suatu faktor yang besar pengaruhnya pada sejarah yang dialami oleh pulau ini.

Hubungan antara Sriwijaya dengan negri diluar Indonesia bukan hanya dengan China, namun juga dengan India. Sebuah prasasti raja yang bernama prasasti *dewa pala dewa* dari Bengala yang dibuat pada akhir abad ke-9 menyebutkan sebuah biara yang dibuat atas perintah Balaputradewa, maharaja dari *Suwarna dwipa*. Prasasti ini dikenal dengan nama prasasti Nalanda. Prasasti lain yaitu prasasti dari *raja-raja* 1 di India Selatan menyebutkan *marawijayottunggawar man* raja dari Kataha dan Sriwisaya telah memberikan hadiah sebuah desa untuk diabdikan kepada sang Budha yang dihormati didalam *cuda manifarma vihara*, yang telah

didirikan oleh ayahnya dikota Nagipattana (Negapatam sekarang).

Hubungan luar negeri Negara Sriwijaya lebih aktif sifatnya. Sriwijaya ini menaruh minat pada pembangunan agama baik di India maupun China. Sebagai seornag penganut Buddha, sang Maharaja tidak –seperti halnya penguasa Hindu-tergantug pada sebuah Devaraja, yang selalu terikat pada sebuah candi yang jika hilang atau hancur akan mengakibatkan kehancuran pula bagi kerajaan. Abad XI, maharaja Sriwijaya memperbaiki sebuah kuil di Kanton. Karya-karya I-Tsing juga menggambarkan betapa masyhurnya Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha. Pertumbuhna pusat itu hanya mungkin jika negeri itu terbuka untuk hubungan dengan luar negeri yang berkembang dalam waktu yang tidak singkat.

4. Sosial-Budaya dan Agama

Sebagai jalur lalulintas utama Asia Tenggara, tentunya segala budaya dan agama dari mancanegara bisa masuk dan berkembang. Agama yang berhasil tumbuh sebagaiagama Negara

adalah agama Budha. Hampir semua pendeta China yang melakukan perjalanan laut antara China dan India akan singgah di kota Palembang untuk belajar disejumlah biara (Munoz, 2009: 165) salah satunya adalah I-Tsing. Bukti telah berkembangnya agam Budha adalah dibangunnya candi Muara Takus (lihat gambar p.6). Selain Budha ada juga aliran Mahayana, Hinayana, Tantrayana dan Mantrayana.

5. Perkembangan perdagangan

Meskipun catatan sejarah dan bukti arkeologi jarang ditemukan, tetapi beberapa menyatakan bahwa pada abad ke-7, Sriwijaya telah melakukan kolonisasi atas seluruh Sumatra, Jawa Barat, dan beberapa daerah di semenanjung Melayu. Dalam hal ini Sartono (1999: 2) menambahkan Selat Malaka dan Selat Sunda. Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda, menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan biaya atas setiap kapal yang lewat. Palembang mengakumulasi kekayaannya sebagai pelabuhan dan gudang perdagangan

yang melayani pasar Tiongkok, Melayu, dan India.

Letak geografis Sumatera sangat mendukung Sriwijaya untuk ikut serta dalam perdagangan internasional yang mulai berkembang antara India dengan daratan Asia Tenggara sejak awal tarikh Masehi (lihat peta p.5). Berita China mengatakan bahwa ada kesamaan adat di Kan-t'oli dengan di Kamboja dan Campa membuktikan bahwa keadaan di ketiga tempat tersebut sama, setidaknya menurut orang-orang China tersebut. Hal ini hanya dapat terjadi jika ada hubungan intensif antara negeri tersebut. Dan ketika hubungan ini terjalin, akan memberikan pengaruh terhadap Sumatera.

Perdagangan dengan China dan India telah memberikan keuntungan besar bagi Sriwijaya. Negeri ini berhasil mengumpulkan kekayaan yang banyak hingga membuatnya termasyhur di seantero negeri. Keadaan seperti ini tentunya mengundang kemungkinan adanya gangguan terhadap stabilitas Negara oleh ulah para bajak laut.

Namun, sampai abad X, Sriwijaya dapat mengatasi hal tersebut.

C. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya

Tentunya jika membicarakan runtuhnya kerajaan Sriwijaya akan ditemukan berbagai sebab. Menurut Suryanegara dkk. (2010 dalam blog) ada dua sebab yakni serangan dari Jawa dan dari Cola. Namun sebab manakah yang menjadi faktor utama runtuhnya kerajaan tersebut.

a. Serangan dari Jawa

Dunia perdagangan dan pelayaran internasional kerajaan Sriwijaya yang maju pesat dikarenakan kerajaan ini menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis yang terletak di sepanjang Selat Malaka disertai kekuatan armada laut yang kuat. Sriwijaya menjalankan politik bersahabat dengan negara-negara tetangganya, walaupun seringkali pula terjadi peperangan yang tidak terelakkan. Misalnya hubungan persahabatan antara Sriwijaya dengan penguasa Jawa telah terjalin sejak zaman raja Rakai Pikatan dari Dinasti

Sanjaya. Tetapi ada kalanya terjadi pertentangan di antara kedua negara tersebut.

Peristiwa pertikaian tersebut diberitakan oleh utusan dari Jawa yang sedang berada di negeri Cina yang mengatakan bahwa negerinya sedang berperang dengan kerajaan Sriwijaya, sedangkan pada saat yang sama (988 M), utusan dari Sriwijaya yang tengah berada di Kanton (Cina) tetap bertahan di kota ini, karena mendengar berita bahwa penguasa Jawa (raja Dharmawangsa) dengan Sriwijaya tengah berperang. Penyebab peperangan tersebut karena memperebutkan kawasan lalu-lintas perdagangan di sekitar Selat Malaka yang memang strategis. Pada waktu wilayah kekuasaan Sriwijaya mendapat serangan dari penguasa Jawa, Sriwijaya pernah meminta bantuan pasukan dari kerajaan Chola (Colomandala) di India. Sriwijaya dapat memulihkan kewibawaannya setelah mendapat serangan dari Jawa tersebut serta dapat mengembalikan wilayah kekuasaannya di kawasan Semenanjung Melayu.

b. Serangan Kerajaan Chola

Pada saat pertikaian antara Sriwijaya dengan Jawa, hubungan antara Sriwijaya dengan kerajaan Chola masih baik. Buktinya, sekitar tahun 1005 M, raja Sriwijaya membangun candi Budha di Nagipattana atau Nagapatam di wilayah kekuasaan kerajaan Chola. Hubungan baik yang dibina raja Sriwijaya, Sri Chulamaniwarmadewa, dengan penguasa Chola tidak berlangsung lama. Karena politik Chola terhadap perluasan kekuatan di lautan seperti yang dilakukan kerajaan-kerajaan kuno sebelumnya yang mengulangi cara-cara yang dipakai untuk mempertahankan monopoli perdagangan mereka.

Tahun 1007 M, kerajaan Chola mulai menyerang ke arah timur. Raja Chola mengklaim bahwa mereka telah menaklukan 12.000 pulau. Ketika raja Chola mangkat pada tahun 1014, sang putra kerajaan Rajendra untuk beberapa tahun tetap bersahabat dengan Sriwijaya dan bahkan memperkuat hadiah yang diberikan

ayahnya pada Vihara Negapatam yang dibangun oleh Sriwijaya.

Dalam serangan Chola tahun 1024, lebih ditujukan kepada daerah Semenanjung Malaka. Tetapi serangan Chola itu tidak sampai menghancurkan sama sekali kejayaan Sriwijaya, karena pasukan Sriwijaya mempunyai daerah pertahanan yang terdiri dari banyaknya anak-anak sungai, kawasan berawarawa, dan pulau-pulau di wilayahnya.

Tahun 1025 M, pasukan Chola kembali mengadakan serangan besar yang melemahkan kedudukan Sriwijaya. Sebagian besar tempat-tempat ini terletak di Sumatra atau Semenanjung Melayu, tetapi beberapa nama-nama itu belum dapat diidentifikasi. Tempat yang dapat diidentifikasi dengan pasti adalah Palembang, Melayu (Jambi), dan Pane (pantai timur Sumatra), Langkasuka (Ligor), Takola dan Kedah di daratan Melayu; Tumasik, (sekarang Singapura), Aceh di ujung utara Sumatra, dan kepulauan Nikobar. Namun, serangan dahsyat tersebut, tetap tidak meruntuhkan Sriwijaya,

hanya memperkecil daerah kekuasaannya.

Setelah serangan Chola, Sriwijaya kembali dapat membangun menjadi negeri yang besar. Bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di daerah Jambi berupa sisa-sisa bangunan suci; sebuah stupa dan beberapa makara. Salah satu dari makara tersebut berangka tahun 1064 M. Bukti lain berupa kronik Sung-shih tetap mencatat adanya utusan-utusan dari Sriwijaya ke negeri Cina pada tahun 1028 M, 1067 M, dan 1080 M.

Jadi, serangan Chola yang dahsyat itu tidak membuat kerajaan Sriwijaya lemah. Namun akibat serangan Chola itu cukup fatal terhadap kekuasaan kerajaan Sriwijaya; kekuatan kerajaan maritim ini mulai menurun dan dominasi kerajaan Sriwijaya atas lalu-lintas perdagangan di selat Malaka lambat laun makin pudar. Sriwijaya sudah tidak mampu lagi mengawasi negeri-negeri bawahannya. Dalam situasi demikian, negeri Melayu yang terletak di Jambi, yang sejak abad ke-7 Masehi menjadi bawahan kerajaan Sriwijaya,

menggunakan kesempatan untuk melepaskan dirinya dari kekuasaan Sriwijaya.

Lemahnya kedudukan Sriwijaya setelah serangan Chola tersebut, juga memungkinkan penguasa Airlangga di Jawa Timur (1019 M-1042 M) untuk merebut kembali daerah yang hilang (1006 M) pada era kekuasaan ayahnya, raja Dharmawangsa. Kebijakan politik Airlangga adalah kerjasama dengan penguasa Sriwijaya dalam menghadapi ancaman dan membendung serangan Chola. Penguasa Sriwijaya dan penguasa Airlangga tersebut sepakat mengadakan perdamaian. Tahun 1030 Airlangga kawin dengan puteri Sanggrama Vijayottunggawarman dari Sriwijaya.

Dari tahun 1030 M sampai 1064 M tak ada yang diketahui tentang sejarah Sriwijaya. Tahun 1064, sebuah prasasti berbentuk patung makara, ditemukan di Solok, Sumatra Barat yang berbatasan dengan Jambi, menyebut seorang Dharmavira, tetapi tidak ada yang diketahui tentangnya. Patung itu mengandung bukti-bukti

seni Jawa. Rupanya setelah itu upaya Sriwijaya menegakkan kembali kekuasaannya atas Sumatra, tetapi tidak pernah mencapai kekuasaannya yang seperti era sebelumnya. Yang jelas, penguasa Sriwijaya dengan Airlangga mencapai suatu kesepakatan untuk membiarkan wilayah kekuasaan Airlangga di bagian barat Nusantara dan Jawa ke timur.

b. Pendangkalan sungai Musi dan menjauhnya garis pantai

Sebab yang satu inilah yang menjadi faktor utama runtuhnya Sriwijaya. Penjelasaannya seperti yang dipaparkan Daljoeni berikut ini. Daerah Sumatera ini merupakan daerah yang curah hujannya melebihi penguapannya. Hal ini mengakibatkan derasnya hujan membuat air meresap terlalu dalam hingga tidak dapat dijangkau oleh akar tumbuhan sekaligus melarutkan bahan-bahan kesuburan tanah. Akibatnya tanahnya tandus, yang kemudian oleh Soebantardjo disebut pemiskinan tanah secara kimiawi. Selain itu, sebagian air

hujan yang tidak ikut meresap ke dalam tanah tetapi mengalir di atas permukaan tanah yang kemudian masuk ke sungai-sungai. Topsoil berisi humus menjadi hanyut sehingga daerah tersebut tidak subur. Nah, yang kedua ini disebut pencucian tanah secara fisis dan menurut Soebantardjo pencucian inilah yang terjadi pada wilayah pusat kerajaan Sriwijaya.

Peristiwa alam ini seolah menjadi vonis bahwa Sriwijaya tidak bisa berkuat lagi. Pasalnya Sriwijaya juga bukan Negara agraris yang memiliki pasokan makanan sendiri. Seperti kita ketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan beras, kerajaan ini mengimpor dari pedalaman dan Jawa. Dengan demikian posisi Sriwijaya semakin tidak menentu. Belum lagi Sriwijaya harus menghadapi serangan dari kerajaan lain.

Ada pula sebab lain yakni masih berkaitan dengan air: terjadinya pendangkalan sungai Musi dan menjauhnya garis pantai yang berakibat tertutupnya akses pelayaran ke Palembang. Hal ini tentunya sangat

merugikan perdagangan kerajaan. Komoditas berharga dan sumber pangan yang semula datang dengan mudah menjadi terhambat dan berhenti. Penurunan Sriwijaya terus berlanjut hingga masuknya Islam ke Aceh yang di sebar oleh pedagang-pedagang Arab dan India. Di akhir abad ke-13, kerajaan Pasai di bagian utara Sumatra berpindah agama Islam. Pada tahun 1402, Parameswara, pangeran terakhir Sriwijaya mendirikan kesultanan Malaka di semenanjung Malaysia. Dari sisa Kerajaan Sriwijaya tersebut tinggalah Palembang sebagai satu kekuatan tersendiri yang dikenal sebagai kerajaan Palembang. Menurut catatan Cina raja Palembang yang bernama Ma-na-ha Pau-lin-pang mengirim dutanya menghadap kaisar Cina tahun 1374 dan 1375. Maharaja ini barangkali adalah raja Palembang terakhir, sebelum Palembang dihancurkan oleh Majapahit pada tahun 1377.

Berkemungkinan Parameswara dengan para pengikutnya hijrah ke semenanjung, dimana ia singgah lebih

dulu ke pulau Temasik dan mendirikan kerajaan Singapura. Pulau ini ditinggalkannya setelah dia berperang melawan orang-orang Siam. Dari Singapura dia hijrah ke Semenanjung dan mendirikan kerajaan Melaka. Setelah membina kerajaan ini dengan gaya dan cara Sriwijaya, maka Melaka menjadi kerajaan terbesar di nusantara setelah kebesaran Sriwijaya. Palembang sendiri setelah ditinggalkan Parameswara menjadi chaos. Majapahit tidak dapat menempatkan adipati di Palembang, karena ditolak oleh orang-orang Cina yang telah menguasai Palembang. Mereka menyebut Palembang sebagai Ku-Kang dan mereka terdiri dari kelompok-kelompok cina yang terusir dari Cina Selatan, yaitu dari wilayah Nan-hai, Chang-chou dan Changuan-chou.

Kesimpulan

Pelokasian Sriwijaya di Palembang memiliki bukti-bukti tak terbantah. Uraian I-tsing bahwa Sriwijaya di tenggara Malayu dan di muara sungai besar. Penelitian

geomorfologi bahwa Palembang abad ke-7 berlokasi di pantai. Sebagian besar prasasti Sriwijaya ditemukan di Palembang. Dan yang terpenting, prasasti Telaga Batu di Palembang merinci nama jabatan yang hanya mungkin ada di pusat pemerintahan: putra mahkota, selir raja, senapati, hakim, para menteri, sampai pembersih dan pelayan istana.

Penguasaan yang kuat atas Asia Tenggara membuat Sriwijaya menjadi negeri maritim-bisnis yang kokoh. Untuk mempertahankan hegemoni tersebut digunakanlah praktik militer darat dan laut (bajak laut). Banyak negeri-negeri yang ditaklukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun Sriwijaya juga menjalin diplomasi yang baik dengan China.

Hubungan baik antara China dan India menjadikan Sriwijaya sebagai *meltingpot* budaya termasuk agama. Sebagaimana yang diberitakan I-Tsing bahwa di Sriwijaya telah berkembang ajaran Budha dan berbagai alirannya. Pembangunan candi dilakukan di Muara takus

sekaligus sebagai legitimasi Sriwijaya atas tanah tersebut.

Wilayah pelayaran-perdagangan yang dibangun dengan baik memberi keuntungan yang besar bagi Sriwijaya. Ekspor-impor yang dilakukan membuahakan jalinan sosial antara Sriwijaya, China, India, Jawa dan negeri lain. Daerah Palembang yang berada ditengah jalur layar-dagang dimanfaatkan untuk menarik pajak.

Keberadaan sungai Musi sangat membantu Sriwijaya dalam impor bahan pangan dan rempah dari pedalaman. Maka dalam hal ini dibangunlah di tepi-tepi sungai tersebut pos-pos dagang. Dalam hal ini meskipun secara teori pada masa-masa tersebut kegiatan manusia masih hanya tergantung pada alam, namun Sriwijaya sudah punya ide untuk memanfaatkan dan membangun alam untuk kepentingan ekonominya. Hal ini memperlihatkan perkembangan bahwa tidak “melulu” determinisme alam tetapi manusia mulai berperan dalam mengelola alam sesuai kebutuhan.

Kebesaran Sriwijaya akhirnya kian runtuh dengan adanya dua sebab, yakni dari dalam dan dari luar. Kondisi curah hujan yang telalu sering di Sriwijaya membuat tanahnya tidak subur lagi. Belum lagi pendangkalan pantai dan sungai Musi yang menyebabkan kemerosotan yang besar. Selain itu adanya serangan dari luar yakni dari Jawa dan kerajaan Chola. Maka berakhirlah kerajaan Sriwijaya

Daftar Pustaka

- Casparis, JG de. 1959. *Prasasti Indonesia II*. Bandung :Dinas Purbakala Republik Indonesia (online) (<http://www.prasastisriwijaya>)
- Daldjoeni, N. 1982. *Geografi Kesenjaraan (Peradaban Dunia) Indonesia*. Bandung: Alumni
- Hall, DG. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Joyo, Guntur Suryo. 2010. *Menelusuri Makna Prasasti Kedukan Bukit*. (Online) (Blog pada WordPress.com) diakses pada 15 April 2011

Kartodirjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1*. Jakarta: Gramedia

Muljana, Slamet. 2008. *Sriwijaya*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara

Munoz, Paul Michel. 2009. *Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara (Jaman Prasejarah-Abad XVI)*. Yogyakarta: Mitra Abadi

**TIPE DAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA
PADA MASA BALI KUNO :
KAJIAN BERDASARKAN DATA PRASASTI**

**Oleh:
I Gde Semadi Astra**

Abstrak

Dalam artikel ini dibicarakan tentang tipe dan sistem pemerintahan desa-desa pada zaman Bali Kuno yang sementara ini belum pernah diungkap secara khusus. Data prasasti yang digunakan sebagai dasar penyusunannya dikumpulkan secara kompilatif dari prasasti-prasasti yang berbahasa Bali Kuno dan Jawa Kuno. Melalui pendekatan ilmu bahasa, analisis data terutama dilakukan secara interpretatif – komparatif, baik tekstual maupun kontekstual. Hasil bahasan terhadap data yang keadaannya relatif terbatas, baik kuantitas maupun kualitasnya, dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, desa-desa pada zaman Bali Kuno ternyata memiliki perbedaan tipe, baik dilihat dari segi letak geografisnya, tingkat perkembangannya, maupun sistem pemerintahannya. Dilihat dari segi sistem pemerintahan khususnya, dapat diidentifikasi ada tipe desa tunggal, desa gabungan atau majemuk, dan ada desa yang bertipe atau berstatus khusus. Kedua, mengenai sistem pemerintahannya, kendati belum dapat digambarkan secara utuh dan jelas, bagaimana pun juga terdapat petunjuk bahwa desa-desa pada zaman Bali Kuno telah memiliki sistem pemerintahan yang teratur. Banyak jabatan tingkat desa telah dikenal, misalnya *sang mathāni*, *mañuratang*, dan *juru kṛtta deśa*. Dapat dipahami bahwa masing-masing pejabatnya, berdasarkan kedudukannya itu diharapkan melaksanakan fungsi serta peranannya sesuai dengan sistem pemerintahan yang telah digariskan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa ada beberapa tipe desa pada zaman Bali Kuno, masing-masing dengan sistem pemerintahannya yang telah dirancang dengan matang menurut ukuran zamannya.

Kata kunci: desa tunggal, desa gabungan, desa tipe khusus, dan jabatan tingkat desa.

Pendahuluan

Rentangan Masa Bali Kuno

Dalam tulisan lain (Astra, 1997: 41-43) telah dijelaskan tentang rentangan waktu yang termasuk ke dalam pengertian “masa Bali Kuno”. Agar pembaca mendapat pemahaman yang diperlukan, inti uraian tersebut dikemukakan pula pada bagian ini.

Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa istilah ”Bali Kuno” digunakan paling tidak dalam kaitan dengan tiga bidang keilmuan, yaitu bahasa, seni arca, dan sejarah politik, yang masing-masing memiliki masa perkembangan yang berbeda. Bahasa Bali Kuno adalah versi kuno bahasa Bali yang digunakan dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh sejumlah raja yang pernah memerintah di Bali. Prasasti-prasasti tersebut berasal dari periode tahun 882-1072 atau abad IX-XI (*cf.* Goris, 1954a: 6-23). Namun, perlu diingat pula bahwa tidak semua prasasti dari periode itu berbahasa Bali Kuno. Prasasti-prasasti lain dari periode itu ada yang berbahasa Sanskerta dan ada pula

berbahasa Jawa Kuno. Dalam bidang seni arca, istilah Bali Kuno pertama kali digunakan oleh W.F. Stutterheim. Dia membedakan keseluruhan patung atau arca Bali sebelum memasuki masa modern ke dalam empat kelompok, yaitu arca-arca yang berasal dari (a) periode Hindu Bali (abad VIII-X), (b) periode Bali Kuno (abad X-XIII), (c) periode Bali Madya (abad XIII-XIV), dan (d) benda-benda atau arca-arca yang belum dapat diberikan penanggalan. Disini terlihat bahwa Stutterheim menggunakan istilah Bali Kuno untuk menyebut masa atau periode yang mencakup babakan waktu kurang lebih tiga setengah abad.

Sementara itu, dalam bidang sejarah politik istilah Bali Kuno digunakan pertama kali oleh R.Goris (1948) dalam kitabnya yang berjudul *Sedjarah Bali Kuna*. Pada hakikatnya dikatakan bahwa masa Bali Kuna (baca: Kuno) berlangsung selama kurang lebih enam setengah abad, yaitu sejak abad VIII sampai dengan kurang lebih pertengahan abad XIV. Periode itu dihitung mulai dari masa

pembuatan prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta pada tablet-tablet tanah liat yang ditemukan di daerah Pejeng di Kabupaten Gianyar pada dewasa ini, dan berakhir pada saat Bali ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1343. Oleh karena pembicaraan dalam tulisan ini adalah tentang pemerintahan desa, yang juga berarti bahwa pada hakikatnya adalah tentang masalah politik, maka pengertian masa Bali Kuno yang digunakan disini adalah periode yang merentang sejak abad VIII sampai dengan pertengahan abad XIV itu. Pengertian seperti itu digunakan pula dalam karya-karya tulis yang dihasilkan oleh I Gusti Ngurah Rai Mirsha dkk (1980, 1986) dan Bambang Sumadio (1990).

Gambaran Umum tentang Prasasti

Gambaran umum ini dipandang perlu dikemukakan di sini karena data primer untuk menyusun tulisan ini—seperti telah disebutkan pada judul—adalah data yang bersumber pada prasasti. Dengan mengesampingkan

hal-hal yang lebih bersifat khusus dan detail, gambaran umum tentang prasasti—dalam hal ini prasasti-prasasti Bali—yang ingin disajikan di sini adalah sebagai berikut.

Pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa prasasti adalah merupakan dokumen resmi kerajaan, dalam artian dikeluarkan oleh raja yang sedang berkuasa pada masa yang bersangkutan, yang berisi tentang kebijakan atau keputusan raja mengenai suatu hal atau suatu desa yang sedang menghadapi masalah. Di antara prasasti-prasasti itu ada yang ditulis pada logam, batu (termasuk batu karang dan batu padas yang telah terpahat baik berupa arca maupun bentuk lain), ada yang berbahasa Sanskerta, Bali Kuno, dan Jawa Kuno. Kebanyakan di antara prasasti-prasasti itu ditulis dengan menggunakan huruf Bali Kuno, dan ada pula dengan huruf *Pranāgarī*, yaitu huruf *Dewanāgarī* dalam versinya yang kuno. Dilihat dari segi alasan atau pertimbangan mengapa prasasti yang bersangkutan perlu dikeluarkan atau dibuat maka prasasti juga dapat

dibedakan menjadi beberapa jenis, misalnya ada prasasti tentang (a) penyelesaian masalah perpajakan yang dihadapi oleh suatu desa, (b) pembukaan kompleks hunian baru, (c) penyelesaian sengketa antara dua desa, dan (d) pemisahan suatu desa dari desa induknya, atau semacam pemekaran desa (wilayah) pada dewasa ini.

Perlu ditambahkan bahwa kendati terdapat perbedaan di antara alasan-alasan dikeluarkannya prasasti yang satu dan yang lainnya, secara umum dapat dikatakan bahwa prasasti pada umumnya memuat pelbagai hal. Dari dalam prasasti yang bersangkutan, lazimnya dapat diketahui unsur-unsur penanggalan prasasti itu, nama raja yang mengeluarkannya, alasan (*sambandha*) mengapa prasasti itu dikeluarkan, inti kebijakan yang dilaksanakan oleh raja atau ratu yang sedang berkuasa, berbagai rincian ketentuan yang berkenaan dengan kewajiban yang harus ditunaikan oleh penduduk suatu desa beserta kewenangan yang dimilikinya, rincian pejabat yang menyaksikan pengeluaran prasasti,

baik saksi dari pejabat tingkat pusat kerajaan maupun pejabat-pejabat dari tingkat lebih rendah, dan ada pula prasasti yang memuat kutukan (*śapatha*) yang berisi tentang sanksi-sanksi gaib yang dapat menimpa orang yang melanggar isi prasasti.

Uraian di atas ini kiranya cukup jelas menggambarkan bahwa isi prasasti adalah mengenai berbagai hal. Akan tetapi, sifat informasi atau data prasasti adalah fragmentaris dan sering stereotipikal. Tidak terdapat keterangan yang jelas tuntas mengenai suatu hal. Ambillah sebagai misal mengenai jabatan-jabatan yang disebut dalam prasasti. Banyak jabatan dapat diketahui dari prasasti, tetapi tidak ada penjelasan yang menyeluruh tentang tata hubungannya baik secara vertikal maupun horizontal, begitu pula tentang uraian tugas serta kewenangannya masing-masing. Penjelasan mengenai hal itu yang didapat dari sumber lain pun belum banyak membantu, kalau tidak boleh dikatakan tidak ada.

Cara Kerja dan Sifat Uraian

Cara kerja yang dimaksud di sini adalah langkah-langkah yang dilakukan mulai dari memilih prasasti-prasasti yang digunakan sebagai sumber data, selanjutnya mengumpulkan data, mengolah serta menganalisis data, dan terakhir menyintesis hasil analisis itu serta menyajikannya sebagai sebuah uraian yang bersifat argumentatif. Hal-hal itu secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

Tidak kurang dari 180 prasasti yang berasal dari masa Bali Kuno telah ditemukan sampai pada dewasa ini. Patut diakui bahwa tidak semua prasasti itu digunakan sebagai sumber data. Pada hakikatnya, data dikumpulkan secara kompilatif dari prasasti-prasasti yang memuat data yang diperlukan atau yang dapat digunakan sebagai penunjang bagi penyusunan tulisan ini. Selain ada yang disajikan secara deskriptif – khususnya pada bagian-bagian tertentu – data yang bersangkutan juga diolah, yaitu diterjemahkan dan diklasifikasikan agar analisis yang

dilakukan lebih terarah. Analisis terpenting yang dilakukan adalah analisis interpretatif komparatif antara data terkait, baik dalam dimensi tekstual maupun kontekstual. Selanjutnya hasil analisis itu disintesis agar tersusun unit-unit yang mampu menggambarkan aspek-aspek atau hal-hal yang telah direncanakan untuk dibicarakan. Hasil sintesis itu disajikan secara informal dan bersifat sistematis.

Sebagaimana telah dikemukakan, ada dua hal pokok yang diungkapkan dalam tulisan ini, yaitu tentang tipe dan sistem pemerintahan desa-desa pada masa Bali Kuno. Mengingat uraian ini mencakup rentangan waktu yang cukup lama yaitu enam setengah abad dan seperti telah dikatakan di depan, sifat data prasasti adalah fragmentaris dan sering stereotipikal maka sudah tentu tidak mungkin menyajikan uraian yang mendetail mengenai hal-hal tersebut. Uraian yang bersifat prosesual yang menggambarkan perubahan atau perkembangan secara runtut tidak mungkin dapat disajikan dalam tulisan

singkat ini. Uraian yang disajikan lebih dipentingkan untuk menyatakan bahwa keberadaan hal-hal yang disebutkan adalah memang bersifat argumentatif. Namun, sifat uraiannya bersifat sangat umum adalah sebuah kenyataan dan menjadi tidak terhindarkan.

Tipe Desa pada Masa Bali Kuno

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai tipe desa, perlu disinggung lebih dahulu pembagian wilayah kerajaan menjadi satuan-satuan atau unit-unit wilayah administratif. Dalam prasasti-prasasti yang berasal dari bagian awal masa Bali Kuno tidak terdapat petunjuk yang memadai mengenai hal itu. Petunjuk atau data yang relatif jelas—kendatitidak sepenuhnya —tentang pembagian wilayah kerajaan didapat dari sejumlah prasasti yang berasal dari periode abad XII-XIII.

Seluruh wilayah Pulau Bali atau *Balidwīpamaṇḍala* sebagai wilayah Kerajaan Bali Kuno pada waktu itu disebut *rājya* ‘kerajaan’. Untuk maksud yang sama digunakan pula istilah *rāt* dan *bhuwana*. Terdapat

pula data prasasti yang memberikan petunjuk bahwa keseluruhan wilayah kerajaan dibagi menjadi satuan-satuan wilayah administratif yang disebut *nāgara*. Pada masa pemerintahan Raja Jayapangus rupanya terdapat tujuh bagian kerajaan yang disebut *nāgara*, sebagaimana terbaca misalnya dalam prasasti Campaga A (1103 Saka). Dalam prasasti itu terdapat bagian yang berbunyi

”... *rumōngö pōh ning mānawakāmāndaka, gunāgrah ikumingkin ri kaswastha nikang rāt rinakṣanira, makadona ri pagōhānikang saptanāgara, ...*”(Callenfels, 1926:46)

yang berarti

’... dengan memperhatikan isi kitab *Mānawakāmāndaka* serta mengambil bagian yang berguna dalam mengupayakan kekokohan wilayah yang dijaganya (diperintahnya), dengan tujuan tegaknya ketujuh bagian wilayah kerajaan, ...’.

Kata *saptanāgara* secara harfiah dapat berarti ‘tujuh kota’. Namun, arti itu dapat menuntun lebih lanjut ke arah interpretasi bahwa di Pulau Bali pada waktu itu terdapat

tujuh kota yang ”cukup besar”, yang masing-masing juga menjadi ibu kota suatu bagian wilayah Kerajaan Bali Kuno.

Lebih lanjut, masing-masing *nāgara* terbagi menjadi sejumlah desa, sudah tentu jumlah desa di masing-masing wilayah *nāgara* tidak mesti sama. Selain itu, perlu ditekankan bahwa desa dalam konteks ini diposisikan sebagai unit wilayah administratif terkecil dalam wilayah kerajaan (*rājya*, *rāt*, atau *bhuwana*) yang disebut Kerajaan Bali Kuno, dan sekaligus juga untuk menyebut semua tipe desa sebagaimana akan dibicarakan pada bagian lebih lanjut uraian ini (Astra, 1997: 159-176).

Dalam berbicara mengenai tipe-tipe desa, mudah dipahami bahwa ada beberapa kriteria dapat digunakan, misalnya letak geografis, sifat hubungan atau asosiasinya dengan desa (-desa) di sekitarnya, tingkat perkembangan suatu desa, dan ukuran besar kecilnya suatu desa. Petunjuk tentang adanya pelbagai tipe desa yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu memang terdapat dalam

prasasti, tetapi sebagai akibat kurangnya data tentang kriteria itu begitu pula data lain tentang desa-desa pada masa Bali Kuno, maka pengelompokan yang dilakukan tidak pernah tuntas. Kendati demikian, uraian yang disajikan diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa desa-desa pada masa Bali Kuno tidak seluruhnya sama atau sejenis.

Berdasarkan letak geografisnya, pada dewasa ini desa-desa lazim dibedakan atas desa pegunungan, desa dataran, dan desa pesisir. Batas geografis antara ketiganya belum sepenuhnya jelas. Sebagai misal ingin dikemukakan beberapa keterangan tentang wilayah pesisir—sudah tentu termasuk didalamnya desa-desa pesisir—yang dikemukakan oleh sementara ahli belakangan ini. Keterangan Rais yang dikutip oleh Budha (2005: 28) antara lain menyatakan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan lautan, ke arah darat mencakup lahan darat sejauh 15 km dari garis pantai dan ke arah laut meliputi perairan laut sejauh 15 km

dari garis pantai. Keterangan lain diberikan oleh Lawrence. Dalam keterangannya itu tidak terdapat bagian yang menyatakan jarak yang pasti. Pada intinya dia mengemukakan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang mencakup perairan pantai, daerah pasang surut, dan tanah daratan yang habitat dan jenis binatangnya beradaptasi secara khusus terhadap keadaan lingkungan yang unik (Ardarini, 2002: 6). Dahuri (2003: 25) memberikan keterangan yang berbeda pula. Dikatakannya bahwa wilayah pesisir yang merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan itu jika ditinjau dari garis pantai (*coastline*) maka dapat dikatakan mempunyai dua batas (*boundries*) yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*).

Segera dapat dikatakan bahwa tiga keterangan yang disinggung ini, kendati memiliki unsur kesamaan, tetapi juga memperlihatkan adanya perbedaan pandangan. Selain itu, tidak

dapat dimungkiri bahwa pandangan-pandangan tersebut adalah bersifat modern yang dapat diyakini belum diterapkan pada masa Bali Kuno. Walaupun demikian, bahwasanya pada masa Bali Kuno telah dikenal adanya perbedaan antara desa pegunungan dan kota, atau paling tidak perbedaan antara kota dan nonkota, dapat diketahui berdasarkan bagian teks prasasti Ujung (962 Saka) yang berbunyi

” ... *tan kna asawa mare nāgara ...*” (‘... tidak kena [tugas] untuk ikut bersidang di kota...’) (Goris, 1954a: 106).

Erat kaitannya dengan letak geografis serta fungsinya, dikenal pula adanya desa yang bertipe tertentu. Berkenaan dengan hal ini dapat dikemukakan desa *Banwa Bharu* yang disebutkan dalam prasasti Bebetin AI (818 Saka). Dalam teks prasasti itu terdapat bagian yang berbunyi,

”... *pircintayangku man tua kuta di banwa bharu, rām paraspara kānakanña olih bunin, tua hetu syuruhku nāyakan pradhana kumpi ugra..., bangunan jnganangan hyang api, simayangña, hangga minanga kangin,*

hangga bukit manghandang kalod, hangga tukad batang karuh, hangga tasik kadya, ..." (Goris, 1954a: 54).

Terjemahannya,

'... keinginanku (baca: keputusanku) tentang Desa *Banwa Bharu* yang telah berbenteng, yang penduduknya menyelenggarakan rapat setelah kembali dari persembunyian; itulah sebabnya aku suruh *Nāyakan Pradhana* yaitu Kumpi Ugra..., untuk memugar serta memperluas kompleks bangunan suci Hyang Api; batas-batasnya, sampai Minanga Kangin, sampai Bukit Manghandang Kalod (Kelod, Bali Baru), sampai di tepi barat (*karuh=kauh*, bahasa Bali Baru) Tukad (Sungai) Batang, sampai tepi selatan laut, ...'.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Desa *Banwa Bharu* adalah desa yang telah diberi pagar pengaman atau benteng (*kuta*). Tidak disangsikan bahwa desa tersebut terletak di wilayah "Bali Utara", sehingga *kalod (kelod)* dan *kadya (kaja)* dalam prasasti ini masing-masing identik dengan arah utara dan selatan. Lebih lanjut bahkan dapat dikatakan bahwa berdasarkan batas-

batas wilayahnya—paling tidak salah satu di antaranya adalah laut (*tasik*)—maka dapat dipahami bahwa desa tersebut terletak di pesisir pantai laut dan merupakan desa yang sudah cukup berkembang; bukan mustahil telah berfungsi sebagai pelabuhan. Jika interpretasi itu dapat diterima maka logis pula desa tersebut diberi berbenteng agar aman dari gangguan perampok atau pengacau lainnya.

Menarik pula untuk dikemukakan disini sejumlah desa yang terletak di pinggir danau (baca : Danau Batur sekarang). Sejak dahulu di pesisir danau itu terletak Desa-desa *Bwahan, Kdisan, dan Air (Er) Abang*. Pada salah satu bagian teks prasasti Bwahan C (1068 Saka) terbaca bagian yang berbunyi, "... *karāman i wingkang ranu maser kdisan, bwahan, er abang, ...*" (Callenfels, 1926: 33) yang berarti '... tetua (wakil-wakil) desa di wilayah danau (baca: Danau Batur) yang tunduk kepada (dikepalai oleh) seorang *ser*, yaitu Desa *Kdisan, Bwahan dan Air Abang, ...*'. Maser dalam konteks ini menunjuk kepada sejumlah desa yang mengakui

kewenangan seorang *ser* (sebuah istilah jabatan). Bertumpu pada kenyataan ini dapat diketahui pula bahwa selain desa yang berdiri sendiri atau desa tunggal, telah ada pula tipe "desa gabungan", dalam artian, dua desa atau lebih karena alasan-alasan tertentu menggabungkan diri atau terikat dalam suatu persekutuan (Astra, 1997 : 166).

Istilah-istilah agak berbeda yang juga digunakan untuk menyatakan desa gabungan adalah *makaser*, *makahaser*, dan *kaseran*. Dalam prasasti Pengotan A II (991 Saka) istilah *makaser* digunakan untuk menyatakan gabungan antara Desa *Silihan* dan *Kundungan*, serta istilah *makahaser* yang terbaca dalam prasasti Trunyan A I (838 Saka) digunakan untuk menyatakan adanya ikatan antara Desa-desa *Turuñan*, *Hasar*, *Halang* *Guras*, *Pungsu*, dan *Pañumbahan*. Sementara itu, istilah *kaseran* digunakan dalam prasasti Batuan (994 Saka) untuk menyatakan gabungan desa yang terdiri atas Desa-desa *Gurang*, *Pangsug*, *Baturan*, *Tapěsan*, *Batu Aji*, *Batu Hyang*,

Nangka, *Rbun*, *Sakar*, *Batu Gyantung*, dan *Likut* (Goris, 1954a: 57; 67; 100; Astra, 1997: 167).

Selain seorang *ser*, ditemukan pula seorang *hulu kayu* (mantri kehutanan) yang kewenangannya diakui oleh lebih dari satu desa. Keadaan ini tampaknya mudah dipahami jika didekati dari sisi kewenangan seorang *hulu kayu* yang berkuasa di wilayah hutan tertentu. Kekuasaannya itu sudah tentu patut diakui oleh semua desa yang ada di seputar hutan yang bersangkutan. Pengakuan tersebut sekaligus juga akan berfungsi sebagai kekuatan pengikat antardesa-desa terkait dalam mewujudkan dirinya sebagai desa gabungan atau persekutuan desa. Keadaan seperti itu terbaca dalam prasasti Batunya A I (855 Saka) yang dikeluarkan oleh Raja Ugrasena. Di sana dikatakan bahwa *Batuan* dan *Haran* disebut desa-desa *makasahulukayu* yang berarti desa-desa yang berada di bawah kekuasaan seorang *huku kayu* (Goris, 1954 a : 68 ; Astra, 1997 : 168).

Kebalikan dari peristiwa pembentukan desa gabungan, pada zaman Bali Kuno telah ada pula pemisahan suatu desa dari desa induknya, seperti halnya yang pada dewasa ini lazim disebut pemekaran wilayah. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan "istri-suami" Gunapriyadharmapatni dan Dharmodayana Warmadewa, tepatnya pada tahun 916 Saka (tahun 994); dalam hal ini pemisahan Desa *Bwahan* dari desa induknya yakni Desa *Kdisan* yang keduanya terletak di pesisir Danau Batur pada dewasa ini. Dari prasasti Bwahan A (916 Saka) yang memuat perihal itu dapat diketahui bahwa pada mulanya Desa *Bwahan* adalah bergabung atau merupakan bagian dari Desa *Kdisan*. Oleh karena itu, dalam beberapa kegiatan atau pelaksanaan kewajibannya, kedua desa itu melakukannya secara bersama-sama, misalnya melaksanakan sidang atau rapat-rapat, membayar pajak, dan bergotong-royong.

Pada tahun 916 Saka (tahun 994) wakil-wakil Desa *Bwahan* menghadap ratu dan raja tersebut di

atas untuk menyatakan keinginan desanya agar baginda berkenan mengubah status Desa *Bwahan*, yaitu lepas dari Desa *Kdisan*. Setelah mempertimbangkan secara cermat maka pasangan penguasa itu pun mengizinkan permohonan wakil-wakil Desa *Bwahan*. Desa tersebut diberikan anugerah prasasti yang berisi rincian hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan sekaligus sebagai ciri atau bukti bahwa Desa *Bwahan* telah berstatus sebagai desa yang berpemerintahan sendiri (*sutantra i k̄awakānya*) (Callenfels, 1926: 27; Goris, 1954a: 83).

Ada satu tipe desa lagi yang dapat diketengahkan di sini, yaitu desa yang berstatus sebagai *jātaka*. *Jātaka* dipimpin atau dikelola oleh seorang *majātaka*. Sebagaimana dikatakan oleh J.G. de Casparis (1940: 57-58), *jātaka* adalah sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pemeliharaan suatu bangunan suci. Gambaran seperti itu antara lain dapat ditangkap dari keterangan dalam prasasti Tejakula (1077 Saka). Dalam prasasti itu dikatakan bahwa Desa *Sabhaya* adalah

berfungsi sebagai *jātaka* bagi bangunan suci Bhatara *Kuñjarāsana* (Ginarsa, 1968 : 14-15 ; Astra, 1997 : 335). Status desa seperti itu mengingatkan kepada bidang tanah yang berfungsi sebagai *laba pura* di Bali pada dewasa ini.

Dapat ditambahkan bahwa dalam prasasti-prasasti di Jawa, wilayah atau bidang tanah semacam itu lazim disebut pula dengan istilah *sima*. Sebagai misal dapat disebutkan *sima* yang disebutkan dalam prasasti Candi Petung II (764 Saka). Dalam prasasti itu dikatakan bahwa Sri Kahulunan menitahkan agar Desa *Tru* dan *Tpussan* yang terletak di wilayah *Watak Kahulunan* dijadikan *sima* untuk bangunan suci *Kamulan i Bhūmi Sambhara* (Sarkar, 1971 : 102). Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa *sima* tidak selalu diperuntukkan bagi bangunan suci. Ada pula *sima* yang diperuntukkan bagi seorang atau sekelompok pejabat. Jika suatu *sima* dianugerahkan oleh raja kepada sekelompok pejabat maka *sima* tersebut harus dikelola secara bergiliran. Dalam prasasti Mantyasih I (829 Saka) misalnya disebutkan ada

beberapa bidang tanah yang dijadikan *sima kapatihan* yang dianugerahkan oleh Raja Balitung kepada lima orang patih yang berjasa bagi kerajaan. Dalam prasasti itu juga ditetapkan agar *sima* tersebut dikelola secara bergantian setiap tiga tahun oleh lima patih yang telah ditetapkan itu (Sarkar, 1972: 65).

Pembicaraan mengenai tipe desa pada masa Bali Kuno diakhiri sampai disini. Apabila pembicaraan itu dikemukakan secara ringkas maka antara lain dapat dikatakan sebagai berikut. Bahwasanya—berdasarkan letak geografisnya—ada desa yang tergolong desa pegunungan, desa pekotaan, dan desa pesisir pantai kiranya dapat dipahami, walaupun hal itu tidak sepenuhnya dapat dikemukakan secara jelas. Selain itu, terdapat pula petunjuk bahwa karena alasan atau pertimbangan tertentu, kendati pada masa Bali Kuno tampaknya sebagian besar desa bertipe desa tunggal, ternyata ada pula tipe desa gabungan, yaitu dua desa atau lebih terikat sebagai sebuah kesatuan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau kewajiban. Kebalikan dari adanya desa gabungan atau desa majemuk,

pada masa Bali Kuno telah terjadi pula pemekaran desa, yakni suatu desa memisahkan diri dari desa induknya. Pisahnya Desa *Bwahan* dari Desa *Kdisan* adalah bukti nyata mengenai hal itu. Akhirnya perlu diingat pula adanya desa atau wilayah berstatus khusus yaitu *jātaka*, semacam dengan *laba pura* pada dewasa ini.

Sistem Pemerintahan Desa pada Masa Bali Kuno

1. Keterbatasan Isi Uraian

Penulis menyadari bahwa penggunaan istilah sistem pemerintahan di sini adalah tidak tepat. Dikatakan demikian, karena sebagai konsekuensi penggunaan istilah itu semestinya penulis menyajikan secara lengkap tatanan segala aspek pemerintahan desa pada masa Bali Kuno. Segera harus diakui bahwa hal itu tidak mungkin penulis dapat lakukan. Kekurangan data merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam hal ini. Bahkan, bukan saja tentang sistem pemerintahan desa yang belum dapat

dijelaskan secara memadai, masalah-masalah yang lebih makro pun tidak sedikit yang belum terjawab atau terpecahkan.

Erat kaitannya dengan pernyataan di atas, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai sistem pemerintahan desa, ingin dikemukakan lebih dahulu beberapa hal mengenai Kerajaan Bali Kuno. Bahwasanya pada masa Bali Kuno (abad VIII sampai pertengahan abad XIV) telah berkembang sebuah kerajaan yang bersifat tradisional dengan corak Hindu-Buddha, tidak perlu disangsikan lagi. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa banyak hal mengenai Kerajaan Bali Kuno itu belum dapat dijelaskan secara saintifik argumentatif, baik mengenai hal-hal yang ada dalam tataran makro maupun yang bersifat mikro. Pada tataran makro misalnya, para ahli belum dapat menyatakan secara meyakinkan di mana lokasi ibu kota atau pusat Kerajaan Bali Kuno, begitu pula belum terjawab tuntas pertanyaan seputar apakah selama masa Bali Kuno kerajaan tersebut tetap merupakan kerajaan tunggal, atau

”kerajaan senusa” yang meliputi seluruh wilayah Pulau Bali, ataukah Pulau Bali pada zaman kuno sempat terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang masing-masing berdaulat.

Pada tataran yang lebih mikro, masalah yang ada juga tidak sedikit. Lama masa pemerintahan masing-masing raja, sistem serta kebijakan pemerintahannya, begitu pula perbedaan antara sistem dan kebijakan pemerintahan raja yang satu dan yang lainnya belum terjelaskan dengan baik. Banyak prasasti memuat istilah-istilah jabatan, baik jabatan yang tampaknya berwenang di tingkat desa maupun di wilayah yang lebih luas dari itu, namun tidak terdapat keterangan memadai tentang tata hubungan antarjabatan, baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal, apalagi mengenai uraian tugas atau kewenangannya. Pelbagai jenis pajak, iuran, cukai, atau yang semacam dengan itu disebutkan dalam prasasti, yang wajib dibayar oleh penduduk desa, namun arah penyetorannya serta

spesifikasi pemanfaatannya sebagian besar belum diketahui dengan jelas.

Hal-hal yang telah disebutkan hanya sebagian kecil dari masalah yang ada, termasuk di dalamnya masalah yang berkenaan dengan pemerintahan tingkat desa. Adagium yang berbunyi *desa mawa cara* yang pada hakikatnya bermakna bahwa masing-masing desa memiliki sistem pemerintahan dan adat istiadat (*sima*, bahasa Bali Baru) yang berbeda, tampaknya memang sudah merupakan sebuah kenyataan pada masa Bali Kuno. Gambaran yang didapat dari sejumlah prasasti cukup jelas menyatakan hal demikian.

Kembali kepada masalah pokok yang ingin dibicarakan dalam pasal ini. Dengan memperhatikan uraian yang telah disajikan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa berkenaan dengan ”sistem pemerintahan tingkat desa” yang akan digambarkan, bukanlah merupakan sebuah sistem yang berlaku bagi seluruh desa Bali Kuno secara seragam. Gambaran yang akan dikemukakan adalah bersifat umum,

dalam artian mengesampingkan hal-hal khusus yang ada di desa-desa tertentu, dan tidak utuh, bahkan bersifat fragmentaris, tidak mampu menunjukkan hubungan antarkomponen secara jelas. Kendati demikian, hal-hal yang disajikan diharapkan tetap mampu memberikan gambaran bahwa desa- desa pada masa Bali Kuno memangtelah memiliki sistem pemerintahan yang teratur; hanya atau terutama karena terbatasnya data yang telah ditemukan maka gambarannya yang jelas dan utuh belum dapat disajikan.

2. Wilayah, Penduduk, dan Susunan Jabatan

Beberapa hal tentang sistem pemerintahan desa yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut. Dua buah istilah jabatan bagi dua tipe desa gabungan, yaitu jabatan *ser* dan *hulu kayu*, serta sebuah jabatan lagi yaitu *sangmajātaka* yang memimpin atau mengelola sebuah *jātaka* telah disebutkan di depan. Belum didapat data yang memberikan petunjuk bahwa masing-masing

jabatan tertinggi itu memiliki perangkat pegawai bawahan khusus yang berbeda susunannya jika dibandingkan dengan susunan pejabat desa pada umumnya. Rupanya, kedua jabatan yang disebut lebih dahulu memang berfungsi hanya sebagai koordinator sejumlah desa yang menjadi wilayah kewenangannya. Sementara itu, *sang majātaka* justru boleh jadi wajib berkoordinasi–palingtidak dalam urusan–urusan tertentu–dengan pejabat-pejabat desa di sekitarnya, atau dengan pejabat-pejabat desa di tempat *jātaka* yang bersangkutan berada.

Lebih lanjut, berdasarkan data prasasti, dapat diketahui bahwa wilayah atau territorial suatu desa pada umumnya disebut *thāni*. Hal itu cukup jelas dapat diketahui dari bagian teks prasasti yang menyatakan batas-batas wilayah suatu desa, seperti contoh di bawah ini.

”...atēhēr pinarimandala
thāninya cinatur deśa,
hinganya wetan air anipi,
hinganya kidul air patal,
hinganya kulwan air
langgrung, hinganya lor bukit
tulangkir...”

Terjemahannya,

”... selanjutnya wilayah desanya dibatasi di keempat arah, batasnya di timur Air Anipi, batasnya di selatan Air Patal, batasnya di barat Air Langgrung, batasnya di utara Bukit Tulangkir, ...” (Astra, 1997: 169).

Bagian teks di atas ini diambil dari prasasti Selat A (1103 Saka) yang dikeluarkan oleh Raja Jayapangus. Topik prasasti itu adalah berkenaan dengan Desa *Kañuruhan* yang penduduknya berselisih dengan para pejabat pemungut *drwyahaji* (pajak, cukai, denda, dan sebagainya) (Astra, 1997: 451). Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa batas-batas wilayah desa (*thāni*) tersebut adalah di sebelah utara Bukit Tulangkir (pegunungan dengan puncaknya Gunung Agung pada dewasa ini), di sebelah timur Air Anipi, di sebelah selatan Air Patal, dan di sebelah barat Air Langgrung.

Penduduk desa pada masa Bali Kuno disebut dengan beberapa istilah dengan cara penulisan yang bervariasi pula. Istilah-istilah itu adalah *anak banua* (*banwa/wanua/wanwa*), *anak thāni*, *tanayan thāni* (Goris, 1954 b :

222; 317), dan *karāman* (Goris, 1954b: 295). Istilah tersebut terakhir ini sesungguhnya merupakan sebuah kata polisemi yang menurut konteksnya dapat berarti (1) seluruh penduduk suatu desa, (2) para pemuka atau tetua desa yang sekaligus merupakan kepala-kepala keluarga dan berhak mewakili keluarga yang bersangkutan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh desa, (3) para pemuka atau tetua desa yang mewakili desa ketika berurusan dengan pihak luar desa, termasuk di dalamnya ketika menghadap raja atau ratu, dan (4) desa sebagai kesatuan badan hukum. Dapat ditambahkan bahwa kata *tuhatuha* sering juga digunakan dengan maksud yang sama dengan *karāman* dalam artinya yang kedua dan ketiga (*cf.* Astra, 1980; 1997: 173-175).

Untuk melandasi pembicaraan lebih lanjut mengenai pemerintahan desa, khususnya mengenai jabatan-jabatan yang berwenang pada tingkat desa, perlu dikemukakan lebih dahulu catatan R. Goris tentang sistem pertingkatan jabatan yang ada pada masa Bali Kuno. Menurutnya, susunan

jabatan yang secara hierarkis berada di bawah *senāpati* yang berkuasa di wilayah *nāgara* secara berurut dari atas ke bawah adalah (1) *samgat*, (2) *ser*, (3) *nāyaka*, (4) *cakṣu*, (5) *sahaya*, (6) *juru*, (7) *hulu*, dan (8) *tuha*, (Goris, 1971: 24-25). Segera ingin dikatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap prasasti-prasasti yang telah ditemukan, catatan Goris itu perlu diperbaiki. Bahasan secara lebih mendetail telah penulis kemukakan dalam tulisan yang lain. Sebagai hasil pemeriksaan dan bahasan – palingtidak sampai pada dewasa ini – hal-hal yang ingin dikemukakan disini adalah bahwa susunan jabatan dari *senāpati* ke bawah adalah (1) *samgat* (sg), (2) *sg. ser*, (3) *sg. nāyaka*, (4) *sg. cakṣu*, (5) *sg. juru*, (6) *sg. tuha*, (7) *ser*, (8) *nāyaka*, (9) *cakṣu*, (10) *sang mathāni*, (11) *mañuratang*, (12) *hulu*, (13) *juru*, (14) *tuha*, dan (15) *sahaya* (Astra, 1997: 307-311).

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wilayah suatu desa disebut *thāni*. Erat berkaitan dengan istilah itu, lebih lanjut dapat dikatakan bahwa pemimpin tertinggi

atau kepala desa disebut *sang mathāni*. Istilah itu antara lain terbaca dalam prasasti Sukawana B (1103 Saka) dalam bagian teks sebagai berikut.

”... mangkana yan kbonya sapinya..., inikēt ning maling kunang, ri thāni salen wnanga ya mālapa dṛwyanya satēmwangnya, tan pamwita ring sang mathāni, ...” (Astra, 1997: 449).

Terjemahannya,

”... demikianlah jika kerbaunya, sapinya ..., kiranya diikatkan oleh pencuri di wilayah desa lain, mereka boleh mengambil miliknya begitu ditemukannya, tidak usah minta izin kepada *sang mathāni*, ...”.

Dalam pelaksanaan mekanisme pemerintahan, masalah-masalah prinsipal yang dihadapi oleh desa dibahas dalam rapat-rapat desa yang dihadiri oleh para tetua desa (*karāman*). Tindakan para tetua desa melaksanakan rapat itu dalam prasasti sering disebut *paraspara* ’berhadap-hadapan’, *rām paraspara* ’rapat berhadap-hadapan’ atau *aparaspara* ’bersidang; rapat berhadap-hadapan’ (cf. Goris, 1954a: 65; 67; 68;

Astra, 1997: 306). Dalam tulisan lain, berdasarkan kata *aparaspāra* 'bersidang' ini kemudian dimunculkan kata *Pamarasparān* untuk menyatakan rapat atau persidangan yang dilaksanakan di tingkat desa. Sementara itu, persidangan di tingkat pusat kerajaan – paling tidak sejak abad XI -- lazim disebut *Pakirakirān i jro makabehan* (Majelis Permusyawaratan Paripurna Kerajaan), dan di tingkat wilayah yang dikuasai oleh seorang *senāpati* disebut *Pakirakirān* (Majelis Permusyawaratan). Perlu ditambahkan bahwa baik *Pakirakirān i jro makabehan* maupun *Pakirakirān*, mungkin juga "Pamarasparān" disamping merupakan dewan atau majelis, masing-masing juga dapat berarti rapat atau sidang yang dilakukannya (Astra, 1997: 222, 305-306). Selain itu, sebagaimana dapat diketahui dari susunan jabatan yang telah disajikan di depan, *sang mathāni* dibantu oleh sejumlah pejabat yang masing-masing menduduki jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tersebut, yang sering kali

terbaca dalam prasasti adalah sebagai di bawah ini.

1. *Mañuratang* (manyuratang)

Secara harfiah kata itu berarti 'menuliskan', Akan tetapi, sebagai sebuah istilah jabatan, mudah dipahami bahwa pejabatnya adalah orang yang memiliki tugas utama sebagai sekretaris atau juru tulis desa dan secara hierarkis berada langsung di bawah *sang mathāni*. Berdasarkan prasasti Bawahan E (1103 Saka) dapat diketahui bahwa Juru Tulis Desa *Bwahan* pada tahun 1181 adalah Gata, yang ikut hadir pada waktu Desa *Bwahan* menerima anugerah prasasti dari Raja Jayapangus (Callenfels, 1926: 45).

Jabatan *mañuratang* harus dibedakan dengan jabatan *mañuratang ājñāyaitu* istilah jabatan untuk "sekretaris kerajaan/negara". Pada masa pemerintahan Raja Jayapangus malahan ada tiga jabatan *mañuratang ājñā* (*m.ā.*), yakni *m.ā.i hulu* (sekretaris kerajaan yang paling atas/"sekretaris kerajaan I"), *m.ā.i tengah* (sekretaris kerajaan yang di

tengah/"sekretaris kerajaan II"), dan *m.ā.i wuntat* (sekretaris kerajaan yang paling akhir/"sekretaris kerajaan III").

2. *Hulu*

Kata *hulu* secara harfiah berarti 'kepala, pemimpin, hulu (pada sungai)' (Zoetmulder, 1982a:648). Perlu diingatkan bahwa tidak semua jabatan *hulu* berposisi di bawah *sang mathāni*. Salah satu diantaranya, yakni *hulu kayu* yang telah disebutkan di depan, bahkan berfungsi sebagai koordinator desa gabungan. Goris menyatakan bahwa *hulu kayu*, dapat diidentifikasi sebagai mantri kehutanan ; pejabatnya merupakan pegawai kerajaan yang mempunyai hubungan erat dengan administrasi pemerintahan desa (*cf.* Goris, 1954b: 248). Goris tidak menyatakan secara jelas tentang status pegawai kerajaan itu, apakah termasuk pejabat tingkat pusat ataukah tingkat daerah. Berdasarkan data prasasti Bwahan A (916 Saka) didapat petunjuk, cukup jelas bahwa pejabat *hulu kayu* termasuk pejabat tingkat desa (*cf.* Goris, 1954a: 83).

Ada sejumlah jabatan *hulu* yang statusnya ada di bawah *sang mathāni*, atau paling tidak pejabatnya mengakui wibawa kewenangan *sang mathāni* karena masalah yang ditanganinya berada di wilayah desa yang bersangkutan. Para *hulu* tersebut adalah (1) *hulu sēkar* atau *hulu kēmbang* (dalam prasasti Pemecutan B dan Prasi A), (2) *hulu sambar* (dalam prasasti Depaa), dan (3) *hulu suwak* (dalam prasasti Bwahan D). Menurut Zoetmulder (1982a: 845) *hulu sēkar* (*skar/kēmbang/kambang*) adalah kepala biara atau asrama rohaniwan yang terletak di wilayah tertentu. Sementara itu, Goris (1954b: 248) menyatakan bahwa *hulu sambar* (*sambah*) adalah penunggu bangunansuci keagamaan. Tentang *hulu suwak* yang berarti 'kepala/pemimpin subak'tidak perlu disangsikan bahwa pejabatnya adalah pemimpin dalam organisasi subak, sebuah organisasi yang mengelola masalah irigasi atau pertanian pada umumnya. Organisasi subak merupakan salah satu kearifan lokal

milik Bali yang sudah terkenal bukan saja di Indonesia, tetapi lebih dari itu.

3. *Juru*

Berdasarkan hasil pembacaan prasasti, dapat dikemukakan empat *juru*, yaitu *juru kṛtta deśa* (dalam prasasti Daya), *juru lampuran bungsu* (dalam prasasti Selat A), *juru lampuran* dan *juru galih manik* (dalam prasasti Bwahan D). Upaya untuk mengetahui tugas masing-masing pejabatnya dapat dilakukan hanya melalui pendekatan arti kata-kata yang membentuk nama jabatan yang bersangkutan. Melalui pendekatan itu dapat dikatakan bahwa *juru kṛtta deśa* mempunyai tugas utama dalam bidang ketertiban desa, kedua *juru lampuran* sebagai petugas keliling, mungkin untuk menyampaikan berbagai informasi kepada penduduk atau pejabat-pejabat tertentu, dan *juru galih manik* kemungkinan besar sebagai petugas yang mengurus masalah beras atau urusan pangan pada umumnya (*cf.* Astra, 1997: 330).

4. *Tuha*

Jabatan ini harus dibedakan dengan *tuha tuha* yang dalam konteks tertentu digunakan semakna dengan istilah *karāman* (tetua yang mewakili keluarga dalam rapat desa atau mewakili desa dalam suatu urusan dengan pihak luar desa). Jabatan *tuha* pertama kali disebutkan dalam prasasti Bangli, Pura Kehen A dalam bentuk kata gabung *tuhañjawa* (Goris, 1954a: 60). Dapat dipahami bahwa pejabat *tuhañjawa* mempunyai tugas utama dalam mengurus tanaman *jawa* (jawawut, jelai) dan mempunyai hubungan erat dengan tugas *nāyakañjawa*.

5. *Sahaya*

Sebagai jabatan paling bawah—sepanjang yang telah diketahui—dapat dipahami bahwa pemangku jabatan ini banyak terlibat dalam pekerjaan fisik. Seorang *sahayan padang* dari desa *Air Rawang* yang disebutkan dalam prasasti Trunyan B (833 Saka) bertugas menyucikan serta menghiasi arca Bhatara Da Tonta di Desa *Turuñan* (Goris, 1954a: 58).

Uraian Tugas dan Tata Hubungan Kerja

Telah dikatakan bahwa belum terdapat data yang memadai tentang uraian tugas serta kewenangan seorang pejabat dalam melaksanakan peranan atas nama jabatan atau statusnya. Kendati demikian, sejumlah uraian hipotetis telah dicoba untuk dikemukakan mengenai hal itu, terutama berdasarkan arti kata-kata yang membentuk istilah jabatan yang bersangkutan. Uraian hipotetis dan singkat itu tetap diharapkan mampu memberikan gambaran, bahkan keyakinan, bahwa masing-masing pegawai pada masa Bali Kuno telah memiliki tugas dan kewenangan yang telah direncanakan dengan baik.

Gambaran tentang tata hubungan kerja antarpejabat, baik yang berdimensi vertikal maupun horizontal, walaupun tidak sepenuhnya jelas, keberadaannya tidak perlu disangsikan. Susunan jabatan yang telah berhasil direkonstruksi—kendatimasih perlu disempurnakan seiring dengan adanya temuan atau interpretasi baru—bagaimana pun juga

telah menunjukkan adanya tingkatan kewenangan. Bahwasanya secara hierarkis seorang *sang mathāni* (kepala desa) mempunyai posisi lebih tinggi jika dibandingkan dengan seorang *mañuratang* (juru tulis desa) adalah logis dan tidak perlu diperdebatkan lagi; begitu pula misalnya antara kewenangan seorang *mañuratang* jika dibandingkan dengan kewenangan seorang *sahaya* (cf. Astra, 1997: 312).

Bagaimana mengenai tata hubungan horizontal? Berbicara mengenai hal ini, secara umum dipersepsi bahwa antarjabatan yang sama di desa-desa yang berbeda—lebih-lebih lagi jika desa-desa tersebut bertetangga—dipertalikan oleh hubungan yang berdimensi horizontal dan bersifat koordinatif. Antara *sang mathāni* di Desa *Kdisan* dan *sang mathāni* di Desa *Air Rawang* (*Abang*) misalnya, mudah dipahami terdapat tata hubungan berdimensi horizontal. Di dalam suatu desa, antarpejabat yang memangku jabatan sejenis dipandang terjalin oleh tata hubungan yang horizontal. Ini berarti bahwa antarpejabat *hulu,*

misalnya *antarahulu skar* dan *hulu suwak*, begitu pula antarpejabat *juru* seperti *antarajuru kṛtta deśa* dan *juru galih manik* dipersepsi terjalin oleh tata hubungan yang berdimensi horizontal (*cf.* Astra, 1997: 313-315).

Prosedur Turunnya Perintah dan Naiknya Permohonan atau Laporan

Teks sejumlah prasasti cukup jelas menyatakan tentang prosedur turunnya titah raja kepada pejabat-pejabat tinggi kerajaan di tingkat pusat, terutama yang terjadi dalam sidang kerajaan yang disebut *Pakirakirān i jro makabehan* (Majelis Permusyawaratan Paripurna Kerajaan/MPPK). Dari prasasti Bwahan D (1103 Saka) misalnya, dapat diketahui bahwa setelah raja lebih dahulu (*karuhun*) mengonsultasikan rencana keputusan yang akan diambilnya kepada para pendeta (dalam hal ini pendeta Saiwa dan pendeta Bauddha) kemudian baginda menurunkan (*umingsor*) perintahnya kepada para *senāpati*. Selanjutnya, para *senāpati* meneruskan

perintah itu kepada para *samgat* (Astra, 1997: 225-229).

Perjalanan perintah selanjutnya sampai kepada pihak yang dituju tidak dinyatakan secara eksplisit dalam prasasti. Jika tidak terjadi keadaan yang bersifat istimewa, kiranya dapat disepakati bahwa perjalanan perintah itu akan mengikuti prosedur yang sesuai dengan sistem atau tata hubungan vertikal yang diterapkan. Prosedur perjalanan naik suatu pelaporan atau permohonan dalam keadaan normal kiranya dapat disepakati pula bahwa pada hakikatnya menempuh jalan yang sama, hanya arahnya bersifat kebalikannya, yakni dari bawah atau pejabat yang paling rendah sampai ke pejabat tertinggi yang dituju oleh laporan atau permohonan yang bersangkutan. Namun, patut digarisbawahi bahwa *argumentum ex silentio* ini tidak memiliki kekuatan yang memadai, bahkan cenderung rapuh.

Hal lain yang perlu dikemukakan adalah informasi yang didapat dari sejumlah prasasti yang berkenaan dengan hal-hal khusus yang

bersifat prinsipal dan dengan intensitas yang relatif tinggi sehingga keadaannya menjadi sangat urgen untuk dipecahkan, misalnya tentang kekisruhan masalah *drwyahaji* (pajak, cukai, dan sebagainya) antara pegawai pemungut pajak dan penduduk suatu desa, yang mengakibatkan penduduk mendapat beban yang sangat berat secara tidak adil. Mengenai hal-hal seperti itu beberapa prasasti memberikan informasi bahwa wakil-wakil desa boleh melaporkannya langsung kepada raja atau ratu, atau langsung kepada pejabat tinggi kerajaan tertentu dan selanjutnya pejabat tinggi tersebut berfungsi sebagai perantara (*makasopana/makamārga/makalarapan*) untuk menyampaikan kepada raja atau ratu (Astra, 2002). Dalam prasasti Selumbung (1250 Saka) yang dikeluarkan oleh Raja Walajaya Kertaningrat misalnya terdapat bagian teksnya yang berbunyi sebagai berikut.

"... bapa sulit, bapa buktyan, bapa tangtang, bapa ungit, makasopana mantri janasingā makakasir bañak tumon, manambah i sira pāduka śri

mahārāja..." (Callenfels, 1926 : 68).

Terjemahannya,

"... Bapa Sulit, Bapa Buktyan, Bapa Tangtang, Bapa Ungit dengan perantaraan Mantri Janasinga yang bernama Banyak Tumon, menghadap baginda Paduka Sri Maharaja, ..."

Dari bagian lain prasasti tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Desa *Salumbung* menghadapi masalah *drwyahaji*. Masalah yang dirasakan sangat memberatkan penduduk itu dilaporkan kepada raja dengan perantaraan Mantri Janasingayang bernama Banyak Tumon. Dapat diyakini bahwa setelah masalah itu dibahas secara cermat dalam sidang MPPK maka raja pun menurunkan keputusannya dalam bentuk sebuah prasasti.

Lebih lanjut, menarik pula untuk dikemukakan bahwa penganugerahan prasasti atau "surat-surat perintah tertentu yang dikeluarkan oleh raja" adalah

merupakan peristiwa yang sangat penting. Terdapat petunjuk bahwa penganugerahan prasasti yang lazim dilakukan dalam sidang MPPK disaksikan oleh pejabat-pejabat tinggi kerajaan dan diterima oleh sejumlah wakil desa. Sebagai misal dapat dikemukakan keterangan dalam prasasti Bwahan E (1103 Saka) yang dikeluarkan oleh Raja Jayapangus untuk Desa *Bwahan*.

Dalam prasasti itu dikatakan bahwa ada sejumlah pejabat tinggi kerajaan dan pendeta hadir sebagai saksi, antara lain pejabat *SenāpatiDinganga* yaitu Pu Anglawung, *Senāpati Dēnda* yaitu Pu Anakas, *Samgat Pituha* yang bernama Jugul Punggung, *Samgat Mañumbul* yang bernama Dhiraja, dan pendeta (*mpungku*) di *Hyang Padang* yakni Dang Acarya Agreswara. Wakil-wakil Desa *Bwahan* yang menerima prasasti itu adalah Bapan I Lemet, Bapan I Pageh Bhuni, Bapan I Gehang, Bapan I Purnna, dan Gata yang pada waktu itu menjabat sebagai juru tulis desa (*mañuratang*) (Callenfels, 1926: 44-45).

Ada satu hal lagi yang ingin dikemukakan disini, yaitu tentang perjalanan yang ditempuh oleh pembawa prasasti atau surat-surat yang memuat titah raja. Sering kali rombongan pembawa prasasti atau titah raja itu harus menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke lokasi yang dituju. Rombongan yang mengemban tugas seperti itu wajib diberi makan sesuai dengan kemampuan (*wehñ amangana sayathāsakti*) desa yang dilewatinya. Bahkan, sering ditegaskan pula bahwa penduduk desa yang disinggahi itu tidak usah memotong ayam untuk keperluan suguhan bagi para anggota rombongan. Kendati demikian, informasi atau data prasasti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penduduk wajib menghormati – bukan saja para anggota rombongannya, tetapi juga, bahkan lebih penting – titah raja yang diusung oleh rombongan tersebut (Astra, 1977: 87-88).

Kesimpulan

Pada bagian penutup uraian ini ada tiga hal yang ingin ditegaskan kembali. Hal-hal itu adalah sebagai berikut.

Pertama, adalah keliru kalau desa-desa pada masa Bali Kuno dipandang sebagai desa-desa yang seragam atau setipe, apalagi sama. Bahkan sebaliknya, terdapat petunjuk bahwa desa-desa pada masa itu telah beragam, atau terdiri atas beberapa tipe. Di antaranya, selain kebanyakan desa merupakan desa tunggal, telah ada pula desa gabungan atau desa majemuk. Selain desa pegunungan yang sekaligus berkonotasi sederhana, telah terdapat pula desa pekotaan, dan desa pesisir pantai yang relatif telah cukup berkembang, bahkan ada pula yang berfungsi sebagai desa pelabuhan. Hal yang menarik pula ialah telah ditemukan pula peristiwa pemekaran wilayah atau desa, dalam artian, sebuah desa melepaskan diri dari "desa induknya" sehingga dengan demikian menjadi desa berpemerintahan sendiri.

Kedua, sejalan dengan adanya perbedaan tipe di antara desa-desa pada masa Bali Kuno, maka mudah pula dipahami adanya perbedaan dalam hal sistem pemerintahannya. Kendati demikian, bahwasanya masing-masing desa telah memiliki sistem pemerintahan yang teratur, tampaknya tidak perlu disangsikan. Sejumlah pejabat tingkat desa telah muncul dalam prasasti dan kendati tidak selalu terpaparkan secara lengkap dan jelas, adanya tata hubungan vertikal maupun horizontal antarpejabat, begitu pula telah adanya mekanisme pemerintahan yang prosedural dengan diwarnai kebijakan-kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, patut diyakini; dan hal-hal itu memang telah disusun atas dasar pertimbangan dan tujuan yang telah direncanakan dengan baik.

Ketiga, keterbatasan atau kekurangan data, baik dari segi kuantitas maupun sifat kekurangjelasannya, merupakan faktor cukup berpengaruh yang mengakibatkan uraian tentang sistem

pemerintahan desa tidak pernah – atau, lebih tepat dikatakan belum pernah -- dapat diuraikan secara memadai, apalagi lengkap. Namun, gambaran tentang sistem pemerintahan desa yang dapat dikemukakan, diharapkan mampu menimbulkan keyakinan bahwa desa-desa pada masa Bali Kuno bukanlah unit-unit pemerintahan yang kacau balau (*chaos*) tetapi sebaliknya telah memiliki keteraturan yang ditata dengan matang menurut ukuran zamannya.

Daftar Pustaka

- Ardarini, Fina, 2002. "Kajian Pengembangan Pariwisata terhadap Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Nusa Penida". (Tesis belum terbit) Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian, Bogor.
- Astra, I Gde Semadi, 1977. "Jaman Pemerintahan Maharaja Jayapangus di Bali (1178-1181 M)" *Lembaran Pengkajian Budaya*, Jilid I, 1977. Halaman 1 – 158. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- _____, 1980. "Sekali Lagi tentang "Karāman" dalam Prasasti-prasasti Bali", dalam *PIA* II, 25 -29 Februari 1980. Halaman 251 –270. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____, 1997. "Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII: Sebuah Kajian Epigrafis"(Disertasi belum terbit). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- _____, 2002. "Birokrasi Pemerintahan pada Masa Bali Kuno: Hubungan Antara Pusat dan Daerah". (Makalah dibawakan dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) IX* di Kediri, 23-27 Juli 2002). Jawa Timur: Kediri.
- Budha, I Wayan Mudana, 2005. "Marikultur dalam Kaitan dengan Kegiatan Pembangunan Wilayah Pesisir Utara Pulau Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali"(Tesis belum terbit), Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Callenfels, P.V. van Stein, 1926. "Epigraphia Balica I". *VBG Deel LVI*. Derdestuk. Halaman III – VIII; 1 – 70 (disertai dengan lampiran foto-foto prasasti).G. Kolff & Co.
- Casparis, J.G. de, 1940. "Oorkonde uit het Singosarische (Midden) 4e Eeuw A.D)", *INI*, 1. Halaman

- 50 – 61. Batavia: Kon. Drukkerij de Unie.
- Dahuri, Rokhmin, 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ginarsa, Ketut, 1968. "Prasasti Baru Radja Ragajaya". Singaradja: Lembaga Bahasa Nasional Tjabang Singaradja.
- Goris, R, 1948. *Sedjarah Bali Kuna*, Singaradja.
- _____, 1954a. *Prasasti Bali*. I. Bandung: N.V. Masa Baru.
- _____, 1954b. *Prasasti Bali*. II. Bandung: N.V. Masa Baru.
- _____, 1971. "Karya Pungutan". Singaradja: Lembaga Bahasa Nasional Tjabang Singaradja.
- Mirsha, I G. N. R. dkk., 1980. *Sejarah Bali*. Denpasar: Pemda Provinsi Daerah Tingkat I Bali.
- _____, 1986. *Sejarah Bali*. Denpasar: Proyek Penyusunan Sejarah Bali, Pemda Tingkat Bali.
- Sarkar, H.B., 1971. *Corpus of the Inscriptions of Java (Corpus Inscriptionum Javanicarum)*, Vol. I. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay.
- Sumadio, Bambang dkk., 1990. "Jaman Kuna" dalam Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (Eds). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid II. Cetakan ke-6. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
- Zoetmulder, P.J., 1982. *Old Javanese-English Dictionary*. Part I. 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

